

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagaimana amanat tersebut Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat disusun berdasarkan RPMD Kota Batam Periode 2016-2021.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran yang strategis dalam Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan juga Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan kegiatan Pelayanan dan Penanganan yang mampu mengurangi Permasalahan Sosial sehingga mampu membantu meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS/Fakir Miskin.

Peranan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial sangat penting, baik dari

pengurangan segi jumlahnya sebagai Penyandang Masalah maupun dalam pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakatnya, serta dalam meningkatkan kemampuan dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi setiap Keluarganya.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Keberadaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bukan berarti tanpa masalah, tetapi justru semakin maju suatu Daerah/Kota maka kemungkinan besar permasalahan Sosial yang akan timbul juga akan meningkat, Menurut data yang dihimpun oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam, Data dari 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di dalamnya termasuk Fakir Miskin, sampai dengan Tahun 2016 berjumlah lebih kurang; 53.850 RTS/Jiwa (41.768 RTS, dan 12.082 Jiwa), data tersebut sebagai dasar dalam memberikan Pelayanan dan penanganan, Permasalahan tersebut dibutuhkan peran dari pemerintah daerah yaitu Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir miskin, dan pemberdayaan Masyarakat, Selain permasalahan teknis juga dikarenakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat masih belum bisa melaksanakan penanganan dan pelayanan secara baik. Sehingga upaya perbaikan terhadap Pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Batam Tahun 2016 - 2021 mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan Penanganan PMKS di Kota Batam. Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk periode lima (5) tahun yang akan datang, yang dijabarkan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2016 – 2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam dilakukan dengan melihat hasil kegiatan pembangunan yang dicapai pada lima tahun sebelumnya (periode 2011-2016), fenomena yang ada, isu strategis yang dihadapi serta mempertimbangkan kajian strategis sebagai bentuk upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, dan merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan normatif yang di jadikan acuan dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
9. Perda Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016 – 2021;
10. Perda Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kota Batam;
11. Perda Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra OPD ini merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Penjabaran dari RPJMD Daerah dan mengacu pada RPJPD Kota Batam, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bersifat Indikatif.

Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disusun dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus

menjadi acuan bagi seluruh stakeholders pembangunan Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Batam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.
2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Mewujudkan perencanaan kegiatan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daerah.
4. Memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
5. Memberikan acuan dalam pembinaan dan penanganan fakir miskin, Rehabilitasi sosial, Perlindungan, Jaminan dan pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, agar terarah, terpadu, tepat sasaran, efektif, efisien serta berkesinambungan.
6. Mewujudkan produktivitas dan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam upaya pemenuhan Kebutuhan dasarnya sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan perangkat Daerah;
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

- 4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;
- Memuat Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Tabel rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kota Batam

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KOTA BATAM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.
- b. Peraturan Walikota Batam Nomor Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam adalah :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mempunyai Fungsi :

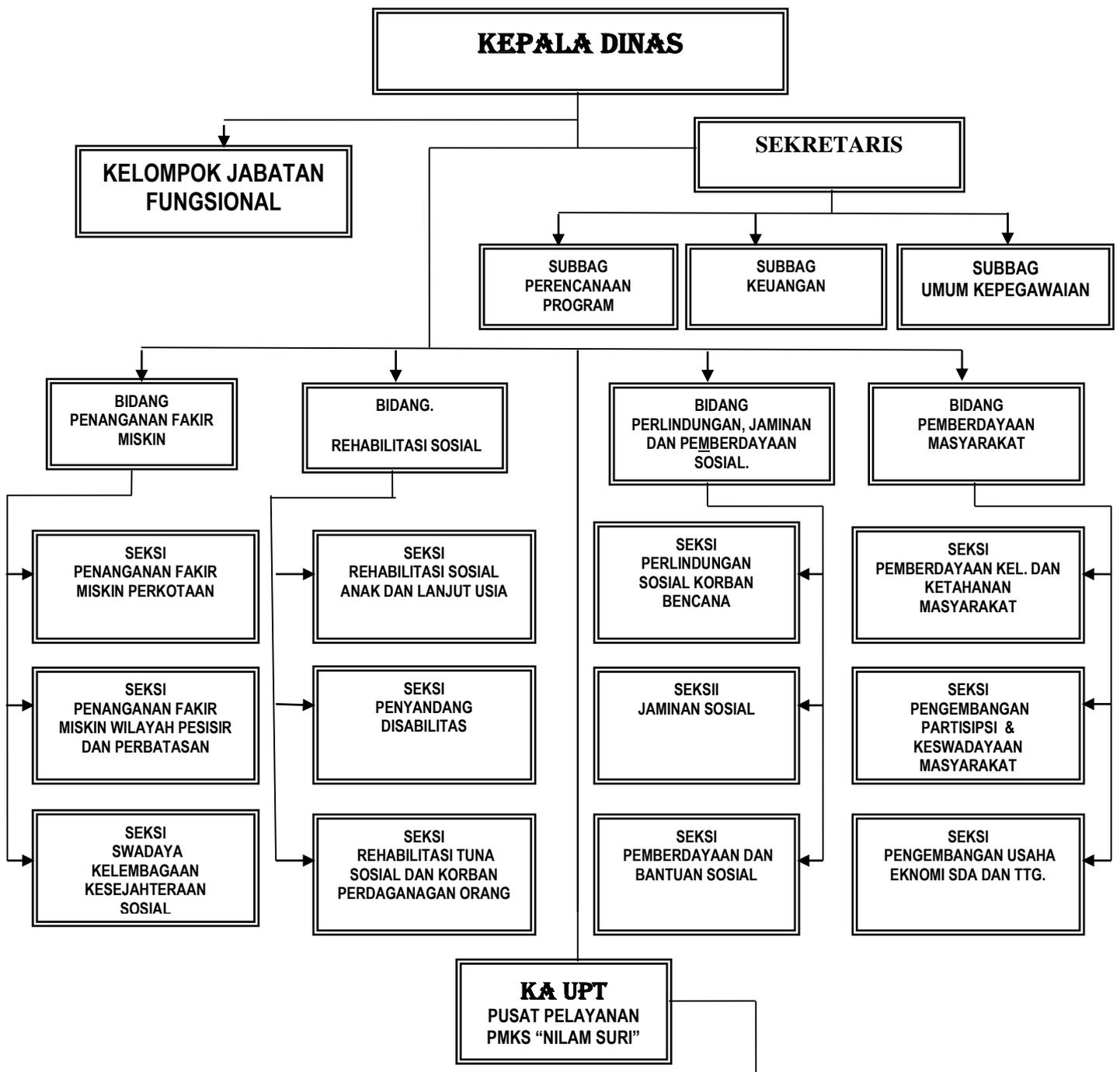
1. Penyusunan program dan kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian;

3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi Bidang, Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penyelenggaraan Administrasi dan Pelayanan Umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas;
8. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam merupakan OPD penggabungan dari yang serumpun yang sebelumnya merupakan salah satu bidang pada Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan UKM Kota Batam, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam., maka bidang Pemberdayaan Masyarakat menjadi bahagian tugas pokok dan fungsi yang berada pada OPD Dinas Sosial yang di gabung menjadi "***Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat***" Kota Batam, sehingga OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terdiri dari :

- a. Sekretariat/Sekretaris
- b. Bidang Penanganan Fakir Miskin
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- f. UPT "Pusat Pelayanan PMKS Nilam Suri" Kota Batam.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM
PERDA NO. 10 TAHUN 2016**



Subag TU.

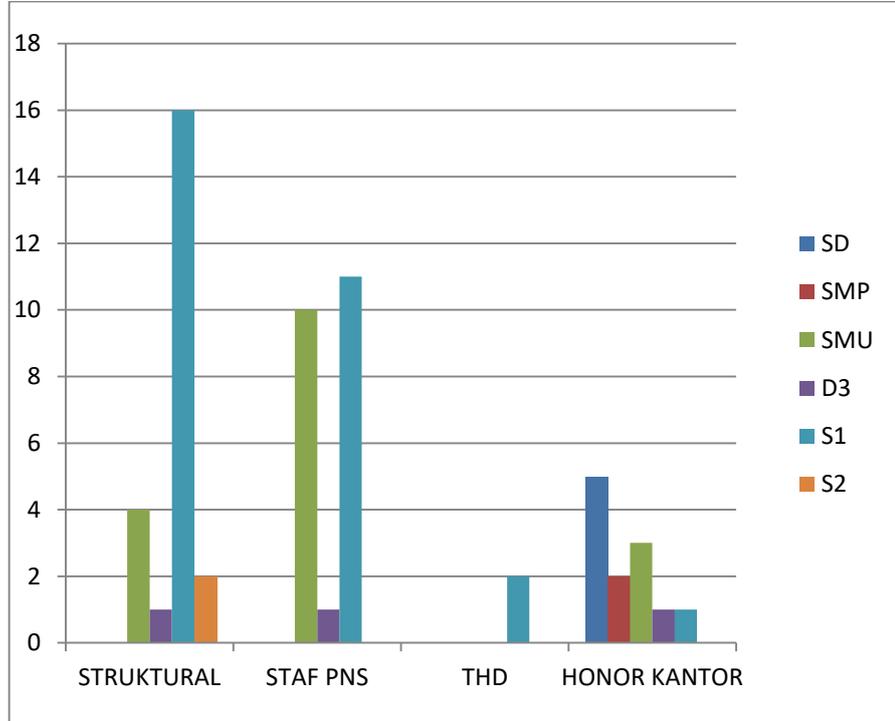
2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Tahun 2016, didukung oleh personel/SDM sebanyak 59 Orang, sebagaimana tergambar pada Grafik 2 dan 3 sebagai berikut, :

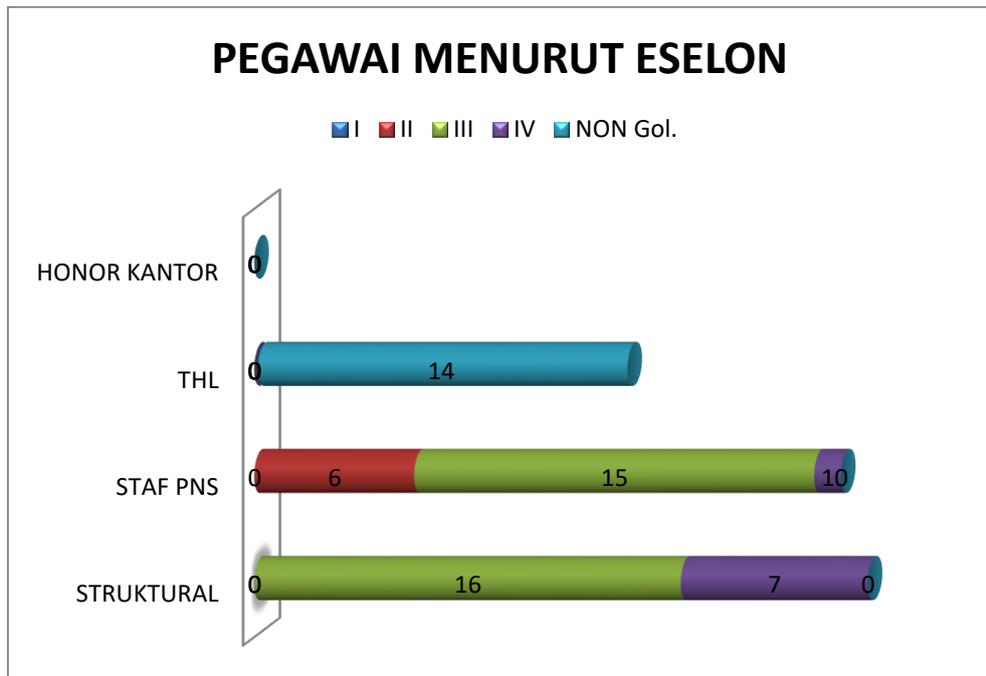
Grafik 1. Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

MENURUT PENDIDIKAN



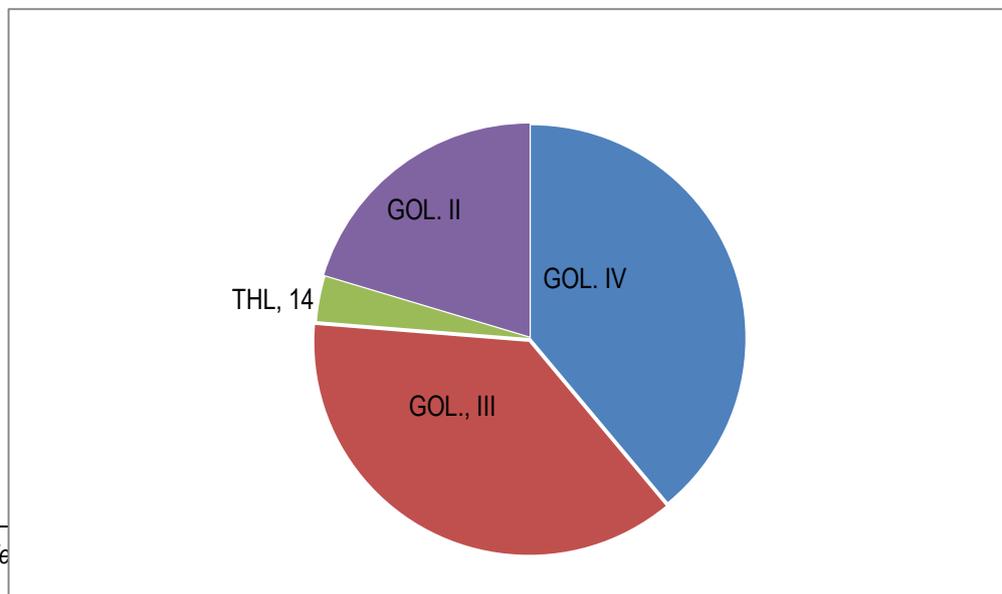
Grafik2.Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

MENURUT ESELON



Grafik 3.Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

MENURUT GOLONGAN RUANG



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ditunjang dengan tersedianya sebuah gedung kantor dan perlengkapan kantor antara lain sebagai berikut ;

a. Tabel Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Satuan	Jumlah/ Luas	Nilai (Rp)
1.	Tanah	M2		10,434.351,007
2.	Gedung dan Bangunan Kantor	Unit	2	1,336,872,461,35
3.	Gedung/ Bangunan Aulla/Ruang Shelter	Unit	1	-
4.	Taman Makam Pahlawan "Bulan Gebang" Batam	Ha	2	-
5.	Gedung Pusat Pelayanan PMKS "Nilam Suri"	Komplek	1	6,300,000,000
6.	Kendaraan Roda 4	Unit	6	626,200,000
7.	Kendaraan Roda 6	Unit	5	702,355,000
8.	Kendaraan Roda 2	Unit	2	46,735,000
9.	Peralatan & Perlengkapan Kantor lainnya	Unit	963	1,092,728,182
10.	DII			-
Jumlah				19,919,303,650.35

2.3 Kinerja Pelayanan ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kondisi Pelayan OPD saat ini, Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, selama lima tahun dapat dilihat sebagai berikut :

1). Data Penanganan terhadap PMKS

Secara rinci capaian kinerja dilihat pada tabel berikut.

No	Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja awal	Target RPJMD 2015	Capaian					Capaian s/d Tahun 2015	Status Capaian	SKPD
					2011	2012	2013	2014	2015			
1	Jumlah rumah yang di renovasi (RTLH)	Rumah	3000	5762	100	428	696	816	747	5.787	tercapai	Dinsos
2	Jumlah anak panti yang dibantu	Jiwa	1.184	3959	816	246	2.529	-	-	4.775	tercapai	Dinsos
3	Jumlah korban bencana yang ditangani	Jiwa	850	8.500	1.150	685	5.430	4.601	305	11.871	tercapai	Dinsos
4	Jumlah Lansia terlantar yang di bina	Jiwa	300	850	-	-	50	200	300	850	tercapai	Dinsos
5	Jumlah orang terlantar dan korban Tindak kekerasan dan pekerja migran	Jiwa	500	1.025	63	125	131	118	80	1.017	Tidak tercapai	Dinsos
6	Jumlah PMKS yang diberi keterampilan	Jiwa	100	340	30	30	60	100	120	440	tercapai	Dinsos
7	Jumlah PKH.	RTS	6573	3680	-	3.053	3.402	3.660	3.172	3.660	Tidak tercapai	Dinsos
8	Jumlah penyandang cacat yang di bantu	Jiwa	566	752	21	81	51	61	51	831	tercapai	Dinsos

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam

NO'	Indikator/Kinerja	TARGET SPM NASIONAL	Target Indikator	Target Renstra PD Tahun ke-						REALISASI CAPAIAN			RASIO CAPAIAN TAHUN KE-		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1,	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran;		100% (1 Th)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%			
B	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur;														
1,	Persentase Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;		100% (1 Th)	1 Th	1 Th	1 Th	-	-	-	1 Th	1 Th	100%			
2,	Persentase Pengadaan Sarana prasarana Aparatur:						1 Th	1 Th	1 Th						
C	Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan, berpartisipasi dan Mandiri dalam Pembangunan;		70% (1500)	70%	75%	75%	80%	80%	85%	-	86,28 %	79,68 %			
1,	Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan;		80 % (565 Kdr))	85%	85%	90%	95%	100%	100%	-	84,95 %	99,30 %			
2,	Persentase Peserta Teknologi Tepat Guna dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dapat diberdayakan;		30% (50)	60%	60%	70%	70%	70%	70%	-	38,89 %	70,35 %			

3,	Persentase Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan;	40% (1000)	40%	45%	45%	50%	55%	60%	-	135%	70,14 %			
D	Persentase PMKS (Masyarakat Miskin) yang memperoleh Pelayanan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;	70% (36.103 Kpm)	75%	75%	75%	80%	85%	85% (54.726 KPM)	100,2 %	51,56 %	57,56 %			
1,	Persentase Basis Data Terpadu yang dapat di Verivali	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%			
2,	Persentase Jumlah SLRT yang dapat berjalan dengan lancar;	192 Org.	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-			
3,	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Perkotaan yang dapat di Rehabilitasi;	450 Unit	100% (100)	100% (50)	100% (50)	100% (50)	100% (100)	100% (100)	100% (100)	-	80 % (40)			
4,	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan yang dapat di Rehabilitasi;	600 Unit	100% (200)	100% (100)	100% (75)	100% (75)	80 % (200)	80 % (200)	100% (200)	100% (100)	80% (60)			
5,	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi terhadap penanganan PMKS.	20% (300)	25% (152)	25% (52)	30% (25)	30% (40)	35% (236)	35 % (300)	202% (152)	57,78 % (52)	27,78 % (25)			
E	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat di Rehabilitasi;	60 % (3800 Org)	60%	65%	70%	75%	80%	85 % (3.230 Org)	83,84 %	62,32 %	70,28 %			
1,	Persentase penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang ditangani;	20 % (725 Org)	15%	15%	20%	20%	20%	20%	34,26% (37)	46.3% (50)	84,46 % (174)			
2,	Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar/didalam panti yang ditangani;	60% (600)	60%	60%	70%	70%	75%	80%	-	-	119 % (500)			
3,	Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti yang ditangani;	20 % (1500)	20%	20%	30%	30%	30%	30%	133%(400)	133% (400)	77,77 % (350)			
4,	Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) diluar panti yang ditangani;	20 % (1.150)	25%	25%	30%	30%	30%	30%	126,95 % (365)	90,59 % (265)	96,52 % (333)			

5,	Persentase PMKS yang telah diberikan keterampilan dasar;	80 % (120)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	125% (120)	41,67 % (40)	41,67 % (40)			
F	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosiaal;	45 % (3000)	45%	45%	50%	50%	60%	65%	(1950)	70,25 %	90,89 %	76,80 %			
1,	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat;	40 % (1500)	40%	45%	50%	55%	60%	65%		100% (1500)	70% (525)	173% (1425)			
2,	Persentase Orang terlantar, Korban Tindak kekerasan, dan Pemulasaran (Pemakaman) bagi tunawan yang di tangani ;	70% (200)	70%	70%	70%	70%	70%	70%		81% (114)	43,55 % (77)	34,23 % (48)			
3,	Persentase jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dapat di Verivali oleh Pendamping PKH.	80% (112)	28%	50%	80%	80%	100%	100%		100% (30)	100% (53)	100% (53)			
4,	Persentase bagi tokoh masyarakat yang mengerti tentang PMKS dan PSKS,	60 % (200)	60%	50%	60%	60%	65%	70%		-	150% (150)	-			

Tabel 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam

NO'	Urusan/Program/Indikator Kinerja	TARGET SPM NASIONAL	Target Indikator	Target Renstra PD Tahun ke-						REALISASI ANGGARAN Th. Ke-			RASIO CAPAIAN TAHUN KE-			RATA-RATA PERTUMBUHAN		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16
A.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1,	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran;		100% (1 Th)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%						
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;																	
	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur;																	
1,	Persentase Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;		100% (1 Th)	1 Th	1 Th	1 Th	-	-	-	1 Th	1 Th	100%						
2,	Persentase Pengadaan Sarana prasarana Aparatur:						1 Th	1 Th	1 Th									

I'	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT;																	
C.	Program Peningkatan Keberdayaan dan partisipasi Masyarakat;																	
	Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan, berpartisipasi dan Mandiri dalam Pembangunan;	70% (1500)	70%	75%	75%	80%	80%	85%	-	86,28 %	79,93 %							
1,	Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan;	80 % (565 Kdr)	85%	85%	90%	95%	100%	100%	-	84,95 %	99,30 %							
2,	Persentase Peserta Teknologi Tepat Guna dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dapat diberdayakan;	30% (50)	60%	60%	70%	70%	70%	70%	-	38,89 %	70,35 %							
3,	Persentase Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan;	40% (1000)	40%	45%	45%	50%	55%	60%	-	135%	70,14 %							
II'	SOSIAL																	
D.	Program Penanganan Fakir Miskin																	
	Persentase PMKS (Masyarakat Miskin) yang memperoleh Pelayanan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;	70% (36.103 Kpm)	75%	75%	75%	80%	85%	85% (54.726 KPM)	100,2 %	51,56 %	57,56 %							
1,	Persentase Basis Data Terpadu yang dapat di Verivali	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100 %	100%	100%							
2,	Persentase Jumlah SLRT yang dapat berjalan dengan lancar;	192 Org.	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-						
3,	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Perkotaan yang dapat di Rehabilitasi;	450 Unit	100% (100)	100% (50)	100% (50)	100% (50)	100% (100)	100% (100)	100 % (100)	-	80 % (40)							

4,	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan yang dapat di Rehabilitasi;	600 Unit	100% (200)	100% (100)	100% (75)	100% (75)	80 % (200)	80 % (200)	100 % (200)	100% (100)	80% (60)						
	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi terhadap penanganan PMKS.	20% (300)	25% (152)	25% (52)	30% (25)	30% (40)	35% (236)	35 % (300)	202 % (152)	57,78 % (52)	27,78 % (25)						
E.	Program Rehabilitasi Sosial																
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat di Rehabilitasi;	60 % (3800 Org)	60%	65%	70%	75%	80%	85 % (3.23 0 Org)	83,8 4 %	62,32 %	70,28 %						
1,	Persentase penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang ditangani;	20 % (725 Org)	15%	15%	20%	20%	20%	20%	34,26 % (37)	46.3% (50)	96,55% (174)						
2,	Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar/didalam panti yang ditangani	60% (600)	60%	60%	70%	70%	75%	80%	-	-	119,05 % (500)						
3,	Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti yang ditangani;	20 % (1500)	20%	20%	30%	30%	30%	30%	133 % (40 0)	133% (400)	77,78% (350)						
4,	Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) diluar panti yang ditangani	20 % (1.150)	25%	25%	30%	30%	30%	30%	126,9 5% (365)	90,59 % (265)	96,52% (333)						
5,	Persentase PMKS yang telah diberikan keterampilan dasar;	80 % (120)	80%	80%	80%	80%	80%	80%	125 % (120)	41,67 % (40)	41,67% (40)						

F.	Program Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan Sosial:																	
	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;		45 % (3000)	45%	45%	50%	50%	60%	65% (1950)	70,2 5 %	90,89 %	76,80 %						
1,	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat;		40 % (1500)	40%	45%	50%	55%	60%	65%	100 % (1500)	70% (525)	173% (1425)						
2,	Persentase Orang terlantar, Korban Tindak kekerasan, dan Pemulasaran (Pemakaman) bagi tunawan yang di tangani ;		70% (200)	70%	70%	70%	70%	70%	70%	81% (114)	43,55 % (77)	34,23 % (48)						
3,	Persentase jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dapat di Verivali oleh Pendamping PKH.		80% (112)	28%	50%	80%	80%	100%	100%	100 % (30)	100% (53)	100% (53)						
4,	Persentase bagi tokoh masyarakat yang mengerti tentang PMKS dan PSKS,		60 % (200)	60%	50%	60%	60%	65%	70%	-	150% (150)	-						

2) Data Rencana Penanganan terhadap PMKS
(Bidang Resos) tahun 2016 -2021.

URAIAN (Jenis PMKS)	SATUAN	REALISASI		
		2016	2017	2018
Anak Balita Terlantar	Jiwa/Org	120		-
Anak Terlantar	Jiwa/Org	200		400
ABH	Jiwa/Org	50		-
Anak Jalanan	Jiwa/Org	200		100
Anak dengan Disabilitas	Jiwa/Org	500		-
Anak yang menjadi Korban tidak Kekerasan	Jiwa/Org	100		-
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Jiwa/Org	100		-
Lanjut Usia terlantar	Jiwa/Org	600		350
Penyandang Disabilitas	Jiwa/Org	1000		160
ODGJ	Jiwa/Org	-		14
Tuna Susila	Jiwa/Org	1300		
Gelandangan	Jiwa/Org	50		200
Pengemis	Jiwa/Org	1000		133
Kelompok Minoritas	Jiwa/Org	200	-	-
Bimbingan Keterampilan PMKS	Jiwa/org	-		40
Jumlah Bidang Resos		7.770		

3). Data Rencana Penanganan terhadap PMKS (Bidang Penanganan Fakir Miskin) Tahun 2016 – 2021.

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
Verifikasi Basis Data Terpadu (BDT)	Jiwa/Org	39.903	37.428	55.669
Pemulung	Jiwa/Org	350	-	-
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa/Org	315	-	-
Bantuan Rehabiltasi Sosial RTLH.	KK/Unit	300	100	100
Keluarga bermasalah sosial Psikologis	Jiwa/Org	-	-	-
Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-
Jumlah		40.868	37.528	55.7669

4). a. Data Penanganan terhadap PMKS (Bidang Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan Sosial) Tahun 2016-2021.

URAIAN	SATUAN	REALISASI			
		2016	2017	2018	2019
Orang Terlantar (Korban Tidak Kekerasan)	Jiwa/Org	100		51	
Tunawan Yang di Makamkan	Jiwa/Org	700		17	
Korban Bencana	Jiwa/Org	3000		1.425	
Jumlah		4.312		1.493	

b. Jumlah dan Sebaran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2018.

NO	KECAMATAN	JENIS KELEMBAGAAN					KET.
		KT/TAGANA	PSM	TKSK	ORSOS/ YAYASAN	PANTI ASUHAN	
1	Sekupang	7/24	5	1			
2	Lubuk Baja	5/4	2	1			
3	Batu Ampar	4/7	4	1			
4	Bengkong	4/7	4	1			
5	Batam Kota	6/8	1	2			
6	Batu Aji	4/12	4	1			
7	Sagulung	6/1	4	1			
8	Sei Beduk	4/6	3	1			
9	Nongsa	5/2	5	1			
10	Blp. Padang	5/3	4	1			
11	Bulang	4/0	4	1			
12	Galang	4/0	1	1			
	J U M L A H	58/74	41	13			

5) Data Rincian Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018.

Tabel data : Jumlah Komponen PKH yang di miliki KPM Pada Tahun 2018

No.	Periode	Bumil	Balita	ANAK SD	ANAK SMP	ANAK SMA	TOTAL PEMBAYARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tahap I Th. 2018						
2	Tahap II Th. 2018						
3	Tahap III Th. 2018						
4	Tahap IV Th. 2018						
	Total	-	-	-	-		
Total terima tahun s/d 2018							

6) Data Pemberdayaan Masyarakat

URAIAN	SATUAN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
UEDSP	Kelurahan	44	44	44	44
LPM	Kelurahan	64	64	64	64
Posyandu	Kader	455	455	455	500
KDS	Kader	128	128	128	128

Sebagaimana Tabel diatas bahwa perkembangan pencapaian Kinerja Penanganan PMKS, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, sesuai dengan data yang tersedia menunjukkan kecenderungan kinerja yang dicapai adalah baik. Hal ini terlihat dari kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan tersebut tidak dapat di pungkiri di lapangan masih ada kesenjangan-kesenjangan bagi PMKS. Hal ini di karenakan arus Urbanisasi ke Kota Batam yang cukup tinggi,

sementara lapangan pekerjaan yang ada bukan bertambah melainkan justru berkurang maka permasalahan sosial pun masih tinggi, sehingga dalam pelayanan masih belum dapat optimal untuk mendorong kemandirian baik bagi Penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan tingkat partisipasi Potensi Sumber kesejahteraan Sosial dalam penanganan terhadap PMKS dan tumbuh kembangnya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kegiatan dan kemandirian di masa mendatang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah;

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi untuk mewujudkan pelayanan OPD yang lebih baik. Adapun Tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia selain terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam melakukan kegiatan dan penanganan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya adalah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Tenaga Penyuluh Sosial, dan para pekerja-pekerja sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.
2. Terbatasnya anggaran yang dimiliki, banyaknya program kegiatan yang dicanangkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan pencapaian target 100 % diperlukan alokasi dana yang tidak sedikit, dana yang bersumber dari dana APBD Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau masih terbatas untuk Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Batam.
3. Kesulitan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas sangat tinggi seperti Tuna Sosial sehingga data selalu berubah (Contoh :

Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, anak punk, waria) sehingga penanganan yang sudah di lakukan orang sudah bergeser ke tempat yang lain sementara pendatang baru masuk menjadi masalah baru kembali, dan begitu seterusnya. Di sisi lain partisipasi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan juga masih kurang dalam membantu Pembangunan bidang Sosial.

Peluang dalam pengembangan pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

1. Adanya struktur yang terintegrasi. Dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam merupakan badan pemerintah daerah yang memiliki struktur organisasi yang terintegrasi sehingga mempermudah dalam mengimplementasikan, elaborasi dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan bagi PSKS dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Adanya partisipasi aktif Potensi sumber kesejahteraan sosial seperti karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, pelopor, para Pekerja Sosial, dan organisasi sosial lainnya yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi dan koordinasi dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan, di Kota Batam
3. Dukungan pihak-pihak terkait, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kota Batam memiliki pegawai yang sebagian kurang berkompeten dalam bidang Pekerjaan Sosial sehingga perlu mengembangkan jaringan kerjasama baik dengan Lembaga Perguruan Tinggi Kesejahteraan Sosial, dengan Lembaga-lembaga Diklat Peksos di bawah Kementerian Sosial, bekerjasama dalam memberikan bantuan pada pelatihan-pelatihan baik yang di adakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun di selenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut diatas.

Strategi yang digunakan Kementerian Sosial dalam agenda ini yang terkait dengan kesejahteraan sosial mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pengembangan kepedulian sosial, dan pranata gotong royong.

2. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya.
3. Pengembangan karakter dan jati diri bangsa.
4. Peningkatan kepercayaan antar warga dan pencegahan diskriminasi.
5. Pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu tingkat kabupaten/kota, untuk memperkuat layanan sosial berbasis komunitas.
6. Pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan kualitas dan standarisasi lembaga kesejahteraan sosial sebagai agen kesetiakawanan sosial.
8. Peningkatan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat.
9. Penguatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesetiakawanan sosial.
10. Peningkatan jejaring kerja kesetiakawanan sosial melalui media, dunia usaha dan masyarakat, termasuk diantaranya forum kepemudaan, pekerja sosial, dan CSR.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISUS-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;

Permasalahan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan urusan sosial saat ini terdapat 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

saat ini mempunyai beberapa persoalan pokok yang menjadi fokus atau perhatian bersama, yaitu:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam lima pilar intervensi masih sangat terbatas,
2. Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS masih ada yang timpang tindih satu sama lain, dituntut untuk bisa meningkatkan kecakapan dan kompetensi sumber daya manusianya.

3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di Kota Batam, yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran masih terbatas;
4. Peran pemerintah Pusat yang masih dominan dalam pelayanan Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
6. Pemberdayaan terhadap kelembagaan kelurahan dalam pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum memadai.
7. Kesulitan Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang bermobilitas sangat tinggi seperti Tuna Sosial sehingga data selalu berubah (Contoh : Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila, anak punk, waria) sehingga penanganan yang sudah di lakukan orang sudah bergeser ke tempat yang lain sementara pendatang baru masuk menjadi masalah baru kembali, dan begitu seterusnya. Disisi lain partisipasi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan juga masih kurang dalam Pembangunan Bidang Sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat yang berada di Kota Batam terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial,

antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kota Batam telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan.

Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam lima pilar intervensi masih sangat terbatas,
2. Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS masih ada yang tumpang tindih satu sama lain,
3. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di Kota Batam, yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran masih terbatas,
4. Peran pemerintah Pusat yang masih dominan dalam pelayanan Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS

sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,

5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
8. Pemberdayaan terhadap Masyarakat masih belum maksimal, sehingga mbelum terdayagunakan secara optimal
9. Pemberdayaan terhadap kelembagaan keluarahan dalam pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum memadai.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 bahwa pemerintah kota Batam akan mewujudkan Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam Sesuai dengan RPJMD periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Visi Kota Batam :

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, akan melaksanakan Misi kedua, adalah;

“Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya”.

Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat, adalah melakukan Penanganan dan Pemberdayaan terhadap PMKS dengan beberapa sasaran adalah sebagai berikut :

1. Mendorong upaya Pembinaan, Pelayanan dan Rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial;
3. Meminimalisir terhadap berkurangnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari sebanyak 26 jenis, di Batam ada beberapa yang tidak diberikan penanganan dan pelayanan karena tidak ada data pendukungnya.
4. Mendorong dan Memberdayakan bagi PMKS sehingga dapat hidup mandiri dan layak di tengah-tengah masyarakat. Pemberdayaan Sosial dalam delapan strategis, yakni :
 - a. kemiskinan (atau ke fakir miskin),
 - b. kecacatan,
 - c. ketelantaran,
 - d. ketunaan sosial,
 - e. keterasingan,
 - f. korban bencana,
 - g. korban tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi,
 - h. Pemberdayaan masyarakat;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam lima pilar intervensi masih sangat terbatas,	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya pengelolaan program kesejahteraan Sosial; 2 Masih kurangnya kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial; 3 Masih kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 4 Masih belum maksimalnya berbagai lembaga baik Pemerintah maupun Masyarakat belum memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT), sebagai basis data dalam penanganan dan penanggulangan Kemiskinan; 	Masih terdapatnya pelayanan kesejahteraan sosial yang belum mencapai akar rumput kemiskinan khususnya di wilayah kantong kemiskinan baik yang tidak terjangkau fasilitas umum atau pun tidak memiliki akses pelayanan;
2	Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS masih ada yang timpang tindih satu sama lain,	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya koordinasi dalam pemberian pelayanan kesos; 2 Belum adanya regulasi lanjutan yang mengatur secara teknis dalam pelaksanaan bantuan dan jaminan sosial; 	Koordinasi yang terukur dengan kapasitas masing-masing stake holder yang belum diwadahi dalam suatu tata aturan yang jelas dan terinci;
3	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di Kota Batam, yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran masih terbatas;	<ol style="list-style-type: none"> 1 Masih kurangnya penguatan terhadap ruang lingkup kelembagaan sehingga menyebabkan kapasitas lembaga belum tercapai secara optimal; 2 Belum teridentifikasi, teregister, penataan dan pengelolaan yang baik terhadap kelembagaan yang ada; 	Masih terbatasnya anggaran dalam pengelolaan kelembagaan yang diberikan sehingga pelayan kurang optimal

4	Peran pemerintah Pusat yang masih dominan dalam pelayanan Program Pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,	1	Masih kurangnya pendelegasian wewenang dalam penanganan terhadap kegiatan kesos yang menyebabkan melambatnya upaya peningkatan parsosmas;	Masih kurangnya strategi dan pola pengembangan dalam meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam menggerakkan pelaksanaan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial;
		2	Masih kurangnya upaya-upaya dalam menggerakkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan partisipasi sosial masyarakat (Parsosmas);	
5	Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,	1	Masih kurangnya Kalangan Dunia usaha yang mendukung program - program dalam penanganan kesejahteraan Sosial;	Kondisi makro masyarakat dalam upaya pemanfaatan potensi sosial kesejahteraan sosial masih belum tersosialisasi dengan baik
		2	Kepedulian Sebagian besar Masyarakat terhadap permasalahan Sosial masih sangat minim;	
6	Pemberdayaan terhadap kelembagaan kelurahan dalam pelayanan terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum memadai.	1	Keterbatasan kemampuan sebagian besar kelembagaan yang ada di kelurahan dalam meningkatkan partisipasi dan peningkatan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan belum terbangun dengan baik;	Masih diperlukan Bimbingan-bimbingan Teknis terhadap Kelembagaan Sosial Kemasyarakatan agar dapat meningkatkan kemampuan dalam memelopori peningkatan partisipasi dan kemandirian di Lingkungan masing-masing;

TABEL : 3.2.
MISI, TUJUAN, SASARAN, URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BERDASARKAN RPJMD KOTA BATAM PERIODE 2016-2021

MISI (2)	TUJUAN (7)	SASARAN	URUSAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
<i>"Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat sejahtera"</i> .	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan	Sosial	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Partisipasi Masyarakat

TABEL 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT
DAN PROPINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN KOTA BATAM,

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota	Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi	Capaian Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Penanganan dan Pemberdayaan sosial terhadap PMKS	Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial terhadap PMKS terutama Fakir miskin / Kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.	meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainya dalam Pemenuhan kebutuhan dasar.
2	Jumlah Bantuan yang diberikan	Terlindungi dan Terjaminya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Perlindungan, jaminan sosial dan pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Jaminan maupun perlindungan Sosial terhadap PMKS.
		Terehabilitasinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan baik;	Meningkatnya pelayanan, penanganan dalam merehabilitasi terhadap PMKS	Meningkatnya pelaksanaan Rehabilitasi terhadap PMKS
3	Jumlah Peran serta dan Partisipasi Masyarakat / Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat /Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan PMKS.	Meningkatnya partisipasi Kelembagaan Sosial dalam Penanganan terhadap PMKS.	Meningkatnya kemampuan Orsos / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam kapasitasnya terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4	Jumlah Kapasitas Lembaga /Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan	Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga kemasyarakatan,	Kemandirian lembaga kemasyarakatan,
5	Prosentase Swadaya Masyarakat	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Mendorong peningkatan terhadap swadaya Masyarakat.	Kemampuan terhadap swadaya masyarakat
6.	Jumlah Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan	Meningkatnya Kapasitas lembaga ekonomi kelurahan	Mendorong kemampuan kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan	Kemampuan meningkatkan kapasitas dan ekonomi secara mandiri;

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis di bidang Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan, dan Pemberdayaan Sosial, dan pemberdayaan Masyarakat, maka untuk mewujudkan visi dan misi periode tahun 2016-2021 ditetapkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam tahun 2016-2021 adalah:

- a. Memberdayakan, Melindungi dan memberikan Jaminan Sosial terhadap, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari segala risiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial;
- b. Terwujudnya aksesibilitas, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam pemenuhan kebutuhan social dasar, penghargaan bagi pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan;
- c. Terjaminnya penyandang Disabilitas berat dan disabilitas ganda, lanjut usia non potensial, eks-penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat

psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;

d. Memantapkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan dan organisasi serta peningkatan peran aktif masyarakat dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan Organisasi dalam pemberdayaan masyarakat
2. Tercapainya pemahaman kelembagaan dan organisasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, adalah sebagaimana Tabel dibawah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaan Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator/ Tujuan/ Sasaran	Realisasi dan		Realisasi Kinerja Sasaran			Target Kinerja Sasaran		
				Target Kinerja		Pada Tahun ke-			Pada Tahun ke-		
				Tujuan							
				2016	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas hidup sosial kemasyarakatan;	Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan, berpartisipasi dan Mandiri dalam Pembangunan;	70%	70%	-	86,28 %	79,68%	80%	80%	85%
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas hidup sosial kemasyarakatan;	Persentase PMKS (Masyarakat Miskin) yang memperoleh Pelayanan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	60%	85 % (3.230 Org)	100,2 %	51,56 %	57,56 %	80%	85%	85% (54.726 KPM)
3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas hidup sosial kemasyarakatan;	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi terhadap penanganan PMKS.	45%	35 % (300)	202% (152)	57,78% (52)	27,78 % (25)	30% (40)	35% (236)	35 % (300)
4	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas hidup sosial kemasyarakatan;	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat di Rehabilitasi;	60%	85 % (3.230 Org)	83,84 %	62,32 %	70,28 %	75%	80%	85 % (3.230 Org)
8	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas hidup sosial kemasyarakatan;	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;	45%	65% (1950)	70,25 %	90,89 %	76,80 %	50%	60%	65% (1950)

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, PERANGKAT DAERAH

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan identifikasi permasalahan strategis sesuai peran Dinas Sosial dan pemberdayaan Masyarakat, maka dilakukan analisa SWOT (*strength, Weakness, Opportunities dan Threat*) untuk menentukan strategi dan kebijakan agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat tercapai. Adapun Analisa SWOT adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Arah Strategi dan Kebijakan

Visi : Kota Batam	Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang berdaya saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"		
Misi (2) : Kota Batam	Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan Masyarakat Sejahtera		
Visi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Terwujudnya pelayanan Sosial yang Prima dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial"		
Misi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS., melalui penanganan Fakir-miskin, rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;		
	2. Mengembangkan prakarsa dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat dalam pendayagunaan PSKS yang berbasis nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan Sosial;		

	3. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keberdayaan lembaga Kemasyarakatan;		
Tujuan :	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas hidup Sosial Kemasyarakatan;	Meningkatkan kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya bagi PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pelayanan Sosial terhadap PMKS secara berkesinambungan; - Validasi data PMKS (kemiskinan) yang baik;
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Bimbingan Sosial kepada PMKS
			<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan akses/jangkauan pelayanan kepada PMKS.
			<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan usaha
		Meningkatkan pembinaan secara berkelanjutan;	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Bimtek dan pemberian insentif yang memadai;

**TABEL : 5.2
ANALISA SWOT**

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	PELUANG (OPPORTUNNITY)	ANCAMAN (THREATS)
<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGHT)</p> <p>a. Struktur Organisasi yang mendukung b. Potensi Pegawai yang tinggi, c. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, d. Tersedianya Anggaran yang cukup,</p>	<p style="text-align: center;">(SO)</p> <p>a. Meningkatkan pengembangan usaha kepada PMKS (fakir miskin) melalui bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) b. Meningkatnya akses serta fasilitas yang dapat di rasakan oleh PMKS.</p>	<p style="text-align: center;">(ST)</p> <p>a. Meningkatkan SDM Pegawai dan juga terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui, Peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat. b. Melaksanakan semua kesepakatan dan MOU yang telah dibuat melalui Rakor dengan lembaga/instansi terkait. c. Melakukan koordinasi lintas sector melalui Kunker. d. Menyediakan/Mapping data PMKS dan PSKS.</p>
<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p>	<p style="text-align: center;">(WO)</p>	<p style="text-align: center;">(WT)</p>

<p>a. Minimnya Jumlah dan kemampuan pegawai/PSKS yang memahami Permasalahan Sosial yang ada,</p> <p>b. Kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas belum memadai.</p> <p>c. Belum ter - updatenya data base PMKS</p> <p>d. Partisipasi bagi Dunia Usaha masih rendah.</p>	<p>a. Meningkatkan Pemberdayaan terhadap Pegawai/PSKS melalui Bimbingan keterampilan atau Peningkatan kapasitas berkenaan dengan masalah Sosial.</p> <p>b. Meningkatkan dan pengembangan pemberdayaan PMKS/masyarakat terutama Pesisir, perbatasan /hinterland dalam upaya kemandirian dan peningkatan kesejahteraan hidup.</p>	<p>a. Meningkatkan kualitas SDM pegawai dan PSKS yang aktif dan profesional;</p> <p>b. Meningkatkan dan mengembangkan potensi SDM dan partisipasi PSKS secara komprehensif.</p>	
No.	Strategi	Kebijakan	Program
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata.	Program Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).
2	Meningkatkan Pemberdayaan Kapasitas Kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan Masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan.	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

BAB. VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

Sesuai dengan penetapan indikator Kinerja masing-masing OPD di dalam RPJMD Kota Batam periode 2016 - 2021 maka untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, ditetapkan Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan adalah sebagai berikut, terlampir;

BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA BATAM

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Th.	Realisasi			Target Capaian			Kondisi Kinerja
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan, berpartisipasi dan Mandiri dalam Pembangunan;	70%	86,28 %	79,93 %	80%	80%	85%		
1	Persentase Kapasitas Lembaga/Organisasi Masyarakat yang dapat diberdayakan;	85%	84,95%	99,30 %	95%	100 %	100%		
2	Persentase Peserta Teknologi Tepat Guna dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang dapat diberdayakan;	60%	38,89%	70,35 %	70%	70%	70%		
3	Persentase Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan;	40%	135%	70,14 %	50%	55%	60%		
B	Persentase PMKS (Masyarakat Miskin) yang memperoleh Pelayanan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;	75%	51,56 %	57,56 %	80%	85%	85% (54.726 KPM)		
1	Persentase Basis Data Terpadu yang dapat di Verivali;	80%	100%	100%	80%	80%	80%		
2	Persentase Jumlah SLRT yang dapat berjalan dengan lancar;	-	-	-	-	100 %	100%		

3	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Perkotaan yang dapat di Rehabilitasi;	100% (100)	-	80 % (40)	100% (50)	100 % (100)	100% (100)	
4	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan yang dapat di Rehabilitasi;	100% (200)	100% (100)	80% (60)	100% (75)	80 % (200)	80 % (200)	
5	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi terhadap penanganan PMKS.	25% (152)	57,78% (52)	27,78 % (25)	30% (40)	35% (236)	35 % (300)	
C.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dapat di Rehabilitasi;	60%	62,32 %	70,28 %	75%	80%	85 % (3.230 Org)	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang ditangani;	15%	46.3% (50)	120 % (174)	20%	20%	20%	
2	Persentase Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar/didalam panti yang ditangani;	60%	-	119 % (500)	70%	75%	80%	
3	Persentase Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti yang ditangani;	20%	133% (400)	77, 77 % (350)	30%	30%	30%	
4	Persentase Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) diluar panti yang ditangani;	25%	90,59% (265)	96,52% (333)	30%	30%	30%	
5	Persentase PMKS yang telah diberikan keterampilan dasar;	80%	41,67% (40)	41,67% (40)	80%	80%	80%	
D.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Perlindungan, Jaminan dan Pemberdayaan Sosial;	45%	90,89 %	76,80 %	50%	60%	65% (1950)	
1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat;	40%	70% (525)	173% (1425)	55%	60%	65%	
2	Persentase Orang terlantar, Korban Tindak kekerasan, dan Pemulasaran (Pemakaman) bagi tunawan yang di tangani ;	70%	43,55% (77)	34,23% (48)	70%	70%	70%	

3	Persentase jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dapat di Verivali oleh Pendamping PKH.;	28%	100% (53)	100% (53)	80%	100%	100%	
4	Persentase bagi tokoh masyarakat yang mengerti tentang PMKS dan PSKS,	60%	150% (150)	-	60%	65%	70%	

BAB VIII PENUTUP

Akhirnya dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategi (Rensra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam tahun 2016-2021 ini diharapkan akan memberikan arah ataupun gambaran sebagai bentuk implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan diatas guna mewujudkan visi :

“Terwujudnya Pelayanan Sosial yang Prima dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”

serta sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam untuk periode berjalan yakni tahun 2016-2021.

Selanjutnya, Rensra Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat Kota Batam ini selayaknya semestinya dievaluasi maupun monitor secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, agar dapat selaras dengan visi Kota Batam yaitu: ***“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”***

Renstra ini telah selesai kami susun, namun dalam penyusunan masih banyak kekurangan baik narasi maupun penyusunan kalimat-perkalimat jadi masih jauh dari sempurna, untuk itu jika ada ketidak sesuaian dan kurang pada tempatnya mohon kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Demikian disampaikan seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan maupun penyusunan Perubahan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan : Di Batam
Pada tanggal, : Februari 2019

Kepala Dinas Sosia Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

HASYIMAH, M.M
Pembina
Nip. 19630607 198606 2 003

Lampiran

Rencana Strategi Tahun 2016 - 2021

Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam

